



BIROKRASI — DAN — ADMINISTRASI PUBLIK

Konsep, Prinsip, dan Praktik
untuk Tata Kelola Pemerintahan
yang Efektif dan Akuntabel



PELAYANAN
PUBLIK



KEBIJAKAN
DAN REGULASI



AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI



TATA KELOLA
YANG BAIK

Dr. Carlos Maia



Birokrasi dan Administrasi Publik

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.



SELFITERA
INDONESIA

Birokrasi dan Administrasi Publik

Penulis: Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.

Penyunting: Neldi Darmian L

Penata isi: Ricky Dwi Ramdhani

Perancang Sampul: Ricky Dwi Ramdhani

Cetakan Pertama, Agustus 2025

ISBN 978-623-496-296-3

vi + 168 hlm.; 14,8 x 21 cm

Diterbitkan Oleh

Selfietera Indonesia

Anggota IKAPI (173/DIY/2023)

Jlatren Mancasan, RT.6/RW.23, Jlatren, Jogotirto, Kec. Berbah,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55572

Email: selfietera@gmail.com

Telp: +62 821-1860-0052

Website: www.selfietera.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari Penerbit

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya berjudul **“Birokrasi dan Administrasi Publik”** dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini hadir sebagai bagian dari upaya memperkaya pemahaman mengenai birokrasi dan administrasi publik, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang terus bergerak menuju sistem yang lebih efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, adil, dan profesional, pembahasan mengenai birokrasi tidak lagi cukup dipahami sebagai urusan struktur dan prosedur semata, melainkan juga sebagai fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang melayani.

Pembahasan dalam karya ini disusun secara sistematis dengan menguraikan konsep dasar birokrasi, teori-teori administrasi publik, kepemimpinan birokrasi, prinsip tata kelola pemerintahan, sistem birokrasi Indonesia, peran aparatur sipil negara, administrasi keuangan publik, digitalisasi, smart governance, hingga akuntabilitas administratif. Setiap bagian diarahkan untuk memberikan pemahaman yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga relevan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, karya ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, praktisi kebijakan, serta pembaca umum yang ingin memahami dinamika birokrasi dan administrasi publik secara lebih utuh.

Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Gagasan-gagasan yang disajikan diharapkan mampu mendorong lahirnya birokrasi yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang nyata, inklusif, dan berkeadilan. Agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak kalangan, karya ini akan dicetak sebanyak mungkin untuk disebarluaskan kepada lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, dan masyarakat luas sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun administrasi publik yang semakin efektif dan akuntabel.

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
BAB I. Asal Usul Dan Perkembangan Birokrasi	1
1.1 Pengertian dan Karakteristik Dasar Birokrasi	1
1.2 Sejarah Birokrasi dalam Perspektif Tradisional dan Modern	4
1.3 Perkembangan Birokrasi di Dunia Barat dan Dunia Timur	6
1.4 Tantangan Historis dalam Perjalanan Birokrasi.....	9
BAB II. Teori Birokrasi	12
2.1 Teori Birokrasi Max Weber	12
2.2 Kritik terhadap Teori Weberian	16
2.3 Teori Neo-Weberian dan Pendekatan Kontemporer	19
2.4 Teori Birokrasi Postmodern	22
BAB III. Kepemimpinan Birokrasi	25
3.1 Peran Kepemimpinan dalam Sistem Birokrasi	25
3.2 Gaya Kepemimpinan Birokratik.....	29
3.3 Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional dalam Birokrasi.....	35
3.4 Kepemimpinan Etis dalam Pelayanan Publik	39
BAB IV. Prinsip-Prinsip Administrasi Publik.....	44
4.1 Prinsip Efektivitas dan Efisiensi	44
4.2 Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi	48
4.3 Prinsip Responsivitas dan Keadilan Sosial	51
4.4 Prinsip Partisipasi dan Etika Administrasi.....	54
Bab V: Sistem Birokrasi Indonesia	60

5.1 Struktur dan Hirarki Birokrasi Nasional	60
5.2 Karakteristik Birokrasi di Pemerintahan Pusat dan Daerah	65
5.3 Dinamika Peraturan Perundang-undangan Birokrasi.....	70
5.4 Reformasi Birokrasi di Indonesia	74
BAB VI. Aparatur Sipil Negara Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia	81
6.1 Kedudukan dan Fungsi ASN dalam Sistem Pemerintahan	81
6.2 Sistem Rekrutmen, Mutasi, dan Promosi ASN	84
6.3 ASN sebagai Agen Perubahan dalam Tata Kelola Pemerintahan	90
6.4 Mewujudkan Good Governance melalui Profesionalisme ASN ..	94
BAB VII. Birokrasi Dan Pengembangan Sektor Publik	101
7.1 Konsep Pengembangan Sektor Publik.....	101
7.2 Peran Strategis Birokrasi dalam Pembangunan	104
7.3 Inovasi Pelayanan Publik oleh Lembaga Pemerintahan.....	107
7.4 Studi Kasus Pengembangan Sektor Publik di Berbagai Daerah	112
BAB VIII. Administrasi Keuangan Publik	116
8.1 Prinsip Dasar Administrasi Keuangan Negara	116
8.2 Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Publik.....	119
8.3 Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Publik.....	121
8.4 Isu Korupsi dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan...	125
BAB IX. Tren Dalam Manajemen Publik	130
9.1 New Public Management (NPM): Konsep dan Kritik	130
9.2 New Public Service (NPS) dan Pendekatan Partisipatif	133
9.3 Digitalisasi dan Smart Governance dalam Administrasi Publik	137
9.4 Manajemen Perubahan di Lingkungan Pemerintahan.....	140
Bab X: Akuntabilitas Administratif	143
10.1 Pengertian dan Dimensi Akuntabilitas Administratif.....	143

10.2 Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal	145
10.3 Mekanisme Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	151
10.4 Optimalisasi Akuntabilitas melalui Teknologi Informasi	156
Penutup	159
Daftar Pustaka	160
Profil Penulis	165

BAB I. Asal Usul Dan Perkembangan Birokrasi

1.1 Pengertian dan Karakteristik Dasar Birokrasi

Istilah birokrasi berasal dari kata “bureau” (Prancis) yang berarti meja atau kantor, dan “kratos” (Yunani) yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam pengertian literal, birokrasi dapat dimaknai sebagai “pemerintahan melalui meja kerja”, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai-pegawai yang bekerja secara administratif dalam struktur formal yang tersusun rapi. Namun dalam pengertian yang lebih luas dan konseptual, birokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan meja atau pegawai, tetapi sebagai sebuah sistem sosial dan organisasi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan fungsi negara.

Dalam konteks ilmu administrasi publik, birokrasi merujuk pada sistem organisasi yang bersifat hierarkis dan rasional yang berfungsi untuk menjalankan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh otoritas politik. Birokrasi berperan sebagai perantara antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Ia menjalankan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pembangunan.

Birokrasi modern menurut Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang menjadi tokoh sentral dalam kajian ini, memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk organisasi tradisional. Weber menyebutkan bahwa birokrasi memiliki enam ciri utama: (1) pembagian kerja yang jelas; (2)

BAB II. Teori Birokrasi

2.1 Teori Birokrasi Max Weber

Teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran organisasi modern. Weber, seorang sosiolog Jerman yang sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi akibat Revolusi Industri dan berkembangnya kapitalisme, melihat perlunya sebuah sistem organisasi yang mampu menjamin efisiensi, ketertiban, dan prediktabilitas dalam mengelola urusan sosial dan ekonomi yang kian kompleks. Dalam kerangka ini, birokrasi tidak hanya merupakan bentuk organisasi, tetapi juga manifestasi dari rasionalisasi yang meresap dalam berbagai aspek kehidupan modern. Weber memandang bahwa masyarakat modern menuntut suatu tatanan sosial yang dapat diprediksi, terstruktur, dan bebas dari kepentingan personal; oleh karena itu birokrasi, dalam pemikirannya, merupakan instrumen paling rasional untuk mewujudkan hal tersebut.

Ciri utama birokrasi dalam teori Weber adalah sistem pembagian kerja yang terstruktur dan fungsional. Setiap posisi dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling melengkapi, sehingga terjadi spesialisasi peran yang memungkinkan efisiensi kerja. Pembagian kerja ini juga bertujuan menghindari duplikasi tugas serta memperjelas garis tanggung jawab setiap individu. Dengan demikian, birokrasi memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya secara optimal, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai hasil yang terukur. Dalam kerangka ini, Weber menekankan pentingnya

BAB III. Kepemimpinan Birokrasi

3.1 Peran Kepemimpinan dalam Sistem Birokrasi

Peran kepemimpinan dalam sistem birokrasi modern adalah faktor penentu arah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus cermin dari legitimasi institusional dalam menjalankan tugas publik. Birokrasi tidak boleh dilihat sebagai mesin administratif kosong yang hanya mengikuti prosedur teknis semata; ia adalah organisasi yang dijalankan oleh manusia dengan aspirasi, nilai, dan dinamika moral. Dalam konteks ini, figur pemimpin adalah pusat energi moral dan dinamika budaya organisasi, yang berfungsi menyatukan fungsi administratif dengan semangat pelayanan, nilai-nilai etika, dan orientasi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa keberadaan sosok pemimpin yang visioner, komunikatif, dan etis, birokrasi akan sekadar bergerak berdasarkan rutinitas formal yang kering dan stagnan, tanpa arah yang jelas bagi pembaharuan atau adaptasi terhadap tuntutan perkembangan sosial.

Pemimpin birokrasi bukan sekadar pemegang posisi formal dalam rantai komando hirarkis, melainkan tokoh yang mempengaruhi budaya kerja, menetapkan standar kinerja, dan menggerakkan sumber daya manusia ke arah efisiensi dan profesionalisme. Ia tidak hanya dituntut mampu menegakkan aturan, tetapi lebih penting lagi untuk mampu menyemangati dan membimbing bawahannya agar bekerja dengan dedikasi, integritas, dan rasa tanggung jawab publik. Dalam praktiknya pun ketika kebijakan pemerintah pusat atau daerah diterjemahkan ke dalam program di unit kerja, kehadiran kepemimpinan yang mampu memotivasi dan memberi contoh keterlibatan nyata akan

BAB IV. Prinsip-Prinsip Administrasi Publik

4.1 Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi merupakan landasan utama dalam administrasi publik yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan. Kedua prinsip ini berperan penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling optimal dan hemat sumber daya.

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan atau program administrasi publik berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dalam konteks administrasi publik, efektivitas berfokus pada hasil akhir dan dampak dari pelaksanaan kebijakan publik terhadap masyarakat. Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu lembaga publik dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya sesuai mandat yang diberikan oleh hukum dan peraturan. Sebagai contoh, jika sebuah program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 10% dalam kurun waktu tertentu, maka program tersebut dianggap efektif apabila target tersebut berhasil dicapai atau bahkan terlampaui.

Efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi pencapaian tujuan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas juga mengandung unsur relevansi dan dampak sosial.

Bab V: Sistem Birokrasi Indonesia

5.1 Struktur dan Hirarki Birokrasi Nasional

Struktur dan hirarki birokrasi nasional di Indonesia merupakan struktur formal yang berfungsi sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan negara dan layanan publik kepada masyarakat. Sistem ini membagi kewenangan dan tanggung jawab secara sistematis dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah, dan mengatur hubungan antar lembaga dengan tujuan menciptakan keteraturan, koordinasi, serta kontinuitas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik menjadi penopang bagi efektivitas administrasi publik, memungkinkan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan tertib, terukur, dan terarah sesuai mandat kelembagaan. Dalam konteks negara yang luas dan heterogen seperti Indonesia, instrumen hirarki birokrasi ini menjadi sangat penting karena mengakomodasi keragaman kebutuhan daerah sekaligus menjaga kesatuan arah pembangunan nasional.

Secara konseptual, struktur birokrasi nasional Indonesia dibentuk atas prinsip keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi, yang terbagi dalam tiga tingkatan utama yakni birokrasi pusat, birokrasi provinsi, dan birokrasi kabupaten atau kota. Tingkat pusat terdiri atas Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi, didampingi Wakil Presiden dan kabinet yang terdiri atas menteri sektor dan lembaga negara yang melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan yang bersifat nasional dan lintas sektor. Di bawah kementerian dan lembaga pusat terdapat eselon-eselon struktural yang mengatur

BAB VI. Aparatur Sipil Negara Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia

6.1 Kedudukan dan Fungsi ASN dalam Sistem Pemerintahan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kedudukan ASN dalam sistem pemerintahan tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan dan fungsi ASN penting sebagai landasan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara normatif, kedudukan ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. ASN terdiri atas dua unsur utama, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya memiliki peran dan fungsi yang sinergis dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.



BAB VII. Birokrasi Dan Pengembangan Sektor Publik

7.1 Konsep Pengembangan Sektor Publik

Pengembangan sektor publik merupakan aspek fundamental dalam pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata. Dalam kerangka teoritik, pengembangan sektor publik merujuk pada proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, efektivitas layanan, serta partisipasi masyarakat. Konsep ini tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan kuantitatif seperti penambahan anggaran atau infrastruktur, tetapi juga mencakup transformasi institusional, inovasi kebijakan, dan pembaruan mekanisme pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor publik harus dipahami secara multidimensional dan terintegrasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional.

Dalam literatur administrasi publik klasik, sektor publik sering dipandang sebagai pengelola urusan kolektif masyarakat yang bertugas memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui mekanisme pemerintahan yang sah dan akuntabel. Namun dalam perkembangannya, konsep ini mengalami perluasan seiring dengan munculnya tuntutan akan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil (*results-based governance*). Transformasi ini mendorong birokrasi untuk tidak hanya menjadi pelaksana regulasi dan distributor sumber daya, tetapi juga sebagai fasilitator

BAB VIII. Administrasi Keuangan Publik

8.1 Prinsip Dasar Administrasi Keuangan Negara

Administrasi Keuangan Negara merupakan landasan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Prinsip dasar yang membimbing administrasi keuangan publik mencakup legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Prinsip legalitas mengharuskan semua kegiatan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mendapat dasar hukum yang jelas, maka mekanisme keuangan publik menjadi terstruktur dan terlindungi dari penyimpangan.

Transparansi adalah prinsip kunci berikutnya yang menuntut keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran publik. Informasi keuangan harus tersedia dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan sosial. Prinsip ini tidak hanya soal publikasi laporan keuangan, tetapi juga membangun ruang dialog tentang bagaimana kebijakan anggaran dirancang dan dikelola. Apabila informasi disampaikan secara terbuka, maka akuntabilitas semakin kuat dan potensi korupsi dan maladministrasi dapat diminimalkan.

Akuntabilitas menegaskan bahwa pihak-pihak yang mengelola keuangan publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka baik secara formal maupun moral. Pengelola

BAB IX. Tren Dalam Manajemen Publik

9.1 New Public Management (NPM): Konsep dan Kritik

New Public Management (NPM) muncul sebagai paradigma reformasi birokrasi yang menandai perubahan signifikan dalam tata kelola sektor publik pada akhir abad ke-20. Lahir dari keprihatinan terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap lamban, kaku, dan tidak efisien, NPM menawarkan sebuah alternatif yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen bisnis. Pendekatan ini menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, orientasi terhadap pelanggan—yang dipahami sebagai warga negara yang berperan sebagai konsumen layanan—serta desentralisasi pengelolaan. Selain itu, NPM mendorong penggunaan mekanisme pasar melalui privatisasi sebagian fungsi pemerintahan dan pengenalan kompetisi dalam penyediaan layanan publik. Konsep-konsep tersebut dipopulerkan oleh para akademisi seperti Osborne dan Gaebler, yang mengusung gagasan “reinventing government” atau membangun ulang pemerintahan sebagai cara untuk menyesuaikan birokrasi dengan tuntutan zaman modern.

Negara-negara anggota OECD seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru menjadi pelopor dalam mengadopsi prinsip-prinsip NPM dalam upaya reformasi administrasi publik mereka. Pemerintah di negara-negara ini mulai menerapkan sistem pengelolaan berbasis kinerja yang menuntut setiap unit kerja publik menetapkan target-target kuantitatif yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini membawa transformasi yang cukup radikal dengan mengimpor praktik bisnis seperti

Bab X: Akuntabilitas Administratif

10.1 Pengertian dan Dimensi Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas administratif merujuk pada kewajiban aparatur publik serta institusi pemerintahan untuk secara terbuka dan bertanggung jawab mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki legitimasi pengawasan, baik internal maupun eksternal. Konsep ini melampaui sekadar kewajiban formal, mencakup dimensi moral dan sosial yang berkaitan dengan legitimasi publik terhadap tindakan administrasi. Dalam kerangka demokratis, akuntabilitas administratif menjadi salah satu fondasi penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan layanan publik dilaksanakan secara sah, transparan, dan adil. Dengan demikian, akuntabilitas administratif bukan hanya masalah teknis, tetapi juga sentimen moral dan politik yang mempengaruhi kepercayaan warga terhadap institusi negara.

Secara teoritis, terdapat tiga dimensi utama akuntabilitas administratif: vertikal, horizontal, dan sosial. Akuntabilitas vertikal mencerminkan hubungan hierarkis antara pejabat yang melapor kepada atasan, seperti pegawai negeri kepada pimpinan kementerian atau kepala daerah. Akuntabilitas horizontal, di sisi lain, dilakukan oleh lembaga pengawas independen seperti Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan, dan lembaga audit publik lainnya. Sementara itu, akuntabilitas sosial melibatkan keterlibatan masyarakat sipil, media, dan publik dalam memeriksa serta memberikan feedback terhadap kebijakan dan layanan pemerintah. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dalam

Untuk memaksimalkan optimalisasi melalui TI, aparatur publik perlu dibekali kompetensi digital yang memadai. Pelatihan penggunaan dashboard, sistem pelaporan digital, analisis data, dan keamanan siber harus menjadi bagian dari pengembangan SDM ASN. Tanpa kepakaran digital, sistem TI hanya menjadi formalitas tanpa manfaat nyata. Sertifikasi kompetensi digital dan pelatihan berkelanjutan menjadi bagian penting strategi reformasi administrasi publik modern.

Regulasi kuat juga menjadi dasar agar teknologi dapat diintegrasikan dalam sistem akuntabilitas administratif. UU Perlindungan Data Pribadi, peraturan SPBE, serta peraturan pengadaan dan audit digital menjadi kerangka hukum yang menjamin transparansi sekaligus perlindungan privasi. Regulasi tersebut memberikan legitimasi formal bagi penggunaan teknologi dan menjamin sistem akuntabilitas tidak disalahgunakan. Dengan demikian, teknologi bukan sekadar alat, tetapi komponen institusional utama dalam tata kelola administratif yang modern, akuntabel, dan berdaya tahan tinggi.

Penutup

Perjalanan panjang pembahasan dalam buku “Birokrasi dan Administrasi Publik” ini menunjukkan bahwa birokrasi bukanlah sekadar struktur administratif yang kaku, tetapi merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Berbagai teori dan pendekatan telah dieksplorasi untuk memberikan perspektif yang utuh, dari warisan Max Weber hingga kritik postmodern, dari kepemimpinan birokrasi hingga prinsip-prinsip good governance.

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman dan tantangan pembangunan yang besar, membutuhkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi tidak hanya menyentuh aspek struktural dan prosedural, tetapi juga menuntut transformasi nilai, kepemimpinan etis, serta pemberdayaan aparatur sipil yang unggul. Maka, tanggung jawab besar ini tidak hanya menjadi milik pemerintah, melainkan juga melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh warga negara.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi pijakan moral dan intelektual bagi siapapun yang ingin turut serta dalam membangun administrasi publik yang bermartabat. Karena pada akhirnya, kualitas birokrasi adalah cerminan dari kualitas bangsa itu sendiri.

Daftar Pustaka

Agus Dwiyanto. (2023). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia* (Cet. ke-4). Yogyakarta: UGM Press.

Agus Hendrayady, Amtai Alaslan, Hildawati, M. Ikrar Budijaya, Ade Putra Ode Amane, M. Irwan Tahir, Afni Nooraini, Lisdawati Muda, Faizah Julina, Sri Susanti Widyasari & Suprpti Widiasih. (2024). *Pengantar Administrasi Publik*. Padang: Hei Publishing Indonesia.

Agus Hendrayady, Syah Abadi Mendrofa, Neni Rosmiati, Fenti Prihatini, dkk. (2024). *Pengantar Administrasi Publik*. Bandung: CV Lauk Puyu Press.

Ahmad Farouq Mulku Zahari et al. (2023). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi.

Ahmad Farouq Mulku Zahari, Muhammad Nur, Andi Nur Fiqhi Utami, Septiawan Ardiputra, Ade Putra Ode Amane, Agus Hendrayady, Komang Adi Sastra Wijaya & Diah Siti Utari. (2025). *Etika Administrasi Publik*. Yogyakarta: Get Press Indonesia.

Amtai Alaslan, Monica F. Bormasa, Ahmad Rosandi Sakir, Ahmad Mustanir, Nur Rohim Yunus, Ade Putra Ode Amane & Neng Suryanti Nengsih. (2023). *Birokrasi Indonesia*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Andri Haryono, Suranto Eko Widodo, Mursyid, I Gusti Made Darma & Ariyanto (Eds.). (2024). *Birokrasi Sektor Publik: Dari Teori ke Implementasi*. Bandung: CV Aneka Pustaka Multimedia.

Basuki Rahmat, Beni Hartanto & Acep Hilman. (2024). Bureaucratic reform in Indonesia: From “Public Administration” to “Public Management”. *Journal of Local Government Issues*, 7(2), 144–158.

Burhanuddin, H. & Ardiputra, S. (2023). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Darmanto & Ngadisah. (2023). *Birokrasi Indonesia* (Edisi 4). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Denhardt, R. B. & Denhardt, J. V. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.

Department of Public Administration, Universitas Nusa Cendana. (2023). *State of the Art of Public Administration: Public Sector Reform and Innovation Toward the World-Class Bureaucracy in 2045*. Yogyakarta: UGM Press.

Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Farazmand, A. (2001). *Handbook of Comparative and Development Public Administration*. New York: Marcel Dekker.

Fioretto, S., Masciari, E. & Napolitano, E. V. (2024). A brief discussion on KPI development in public administration. *arXiv preprint*. December.

Frederickson, H. G. (2005). *Public Administration with an Attitude*. Belmont: Wadsworth.

Gede Wirata, I Wayan Astawa, Sri Sulandari, I Nyoman Suargita & Komang Sarining. (2023). *Buku Ajar Administrasi Publik*. Medan: Media Penerbit Indonesia.

Giest, S. & Roberge, I. (Eds.). (2024). *The Routledge International Handbook of Public Administration and Digital Governance* (1st ed.). London: Routledge.

Habsulhadiprasodjo Nurhadi. (2023). *Reformasi Birokrasi: Tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Hughes, O. E. (2012). *Public Management and Administration: An Introduction*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Islah, K., Nasution, U. B., Susetyo, I. B., Apriyanto, A., Haryanti, T., Firzah, M., Sulistyorini, D. & Dinata, C. (2024). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.

Jenny M. Lewis. (2023). *Policy-Making as Designing: The Added Value of Design Thinking for Public Administration and Public Policy*. London: Routledge.

Jenny M. Lewis. (2024). *The Handbook of Measuring Governance*. Abingdon: Routledge.

Jihad, S., Nawawi, J., Indar, N. I., Tang, M. & Ibrahim, M. A. (2024). English learning policy in Indonesia: A public administration perspective. *Proceedings Paris Conference on Education 2024*, pp. 441–452.

Joko Tri Nugraha & Matheus Gratiano Mali. (2025). *Administrasi Publik Indonesia: Dari Teori Klasik ke Tata Kelola Masa Depan*. Jakarta: PT Literapedia Utama Publishing.

Kettl, D. F. (2015). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Lewis, J. M. (2024). *The Handbook of Measuring Governance*. Abingdon: Routledge.

Nurul Fadlifah et al. (2024). Challenges in public administration in Indonesia as a pathway to sustainable governance. *Inovasi Analisis Data Inc*.

Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Prasojo, Eko (Ed.). (2010). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Antara Hambatan dan Harapan*. Depok: UI Press.

Riris Katharina (Ed.). (2022). *Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rohr, J. A. (1986). *To Run a Constitution: The Legitimacy of the Administrative State*. Lawrence: University Press of Kansas.

Samson Laurens, S., Sergio, A. & Hafidhoh, H. (Eds.). (2025). *Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: CV Green Publisher Indonesia.

Simarmata, R. P. (2024). *Birokrasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Literasi Nusantara.

Stillman, R. J. (2009). *Public Administration: Concepts and Cases*. Belmont: Wadsworth.

Storr, V. H., Lemke, J. S. & Meehan, B. J. (Eds.). (2025). *Applications of Public Choice Theory to Public Policy*. London: Bloomsbury Academic.

Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto & Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi. (2025). *Reformasi Administrasi Publik & Pembangunan*:

Transformasi Birokrasi di Era VUCA. Surabaya: Airlangga University Press.

Susilo. (2023). *Birokrasi & Governancy Publik: Buku Ajar*. Jakarta: Media Sains Indonesia.

Thoha, Miftah. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tris Dina Susanti. (2024). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Warsito Utomo. (2023). *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik!*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.

Zein, H. M. (Ed. Rizal Kurnia). (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Profil Penulis



Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si., lahir di Dili pada 4 November 1974, sebagai putra dari Manuel Maia (+) dan Fernanda Maia (+). Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian. Ia menikah dengan Romana Christiana Boy dan dikaruniai dua orang anak, Dirgatama Manuel Maia dan Maria Fernanda Maia, yang menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup dan pengabdian.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 9 Dili dan diselesaikan pada tahun 1988. Ia melanjutkan ke SMP Katolik Paulus VI Dili hingga lulus pada tahun 1991, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Dili pada tahun 1994. Sejak masa sekolah, bakat kepemimpinan dan ketekunannya telah tampak melalui berbagai aktivitas organisasi dan kepemudaan yang diikutinya.

Minatnya pada bidang sosial membawanya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Jurusan Ilmu Pekerjaan Sosial, dan meraih gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (AKS) pada tahun 1998. Ia kemudian memperdalam kajian sosiologi dengan menempuh Program Magister Sosiologi di Universitas

Muhammadiyah Malang dan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada tahun 2004. Puncak capaian akademiknya diraih pada tahun 2020 dengan gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Latar belakang akademik ini membentuk fondasi kuat bagi pemikirannya dalam bidang administrasi publik, kebijakan, dan pembangunan sosial.

Sejak usia muda, Dr. Carlos aktif dalam berbagai organisasi. Ia terlibat dalam Gerakan Pramuka dari jenjang Siaga hingga Penegak Saka Dirgantara di Dili (1984–1999). Kepemimpinannya terasah ketika menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Katolik Paulus VI (1989–1991) serta menjadi anggota dan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Dili (1992–1993). Ia juga aktif dalam dunia bela diri melalui Perguruan Pencak Silat Padjadjaran (1991–1994) dan kemudian Tarung Derajat sejak 1994 hingga kini. Pengalaman ini memperkaya karakter kepemimpinan, ketegasan, serta daya juangnya.

Berbagai capaian penting turut mewarnai perjalanan organisasinya. Pada tahun 1991, ia menjadi peserta Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, sebagai Pratama Kontingen Timor Timur. Tahun 1993, ia terpilih sebagai Paskibraka Nasional dan dipercaya menjabat Lurah Putera Desa Bahagia serta Komandan Kelompok 17 Pagi di Istana Negara, Jakarta. Dalam bidang olahraga bela diri, ia pernah menjadi pelatih Tarung Derajat untuk Kontingen Timor Leste pada SEA Games XXVI tahun 2011 di Jakarta–Palembang, serta pelatih Kontingen Nusa Tenggara Timur pada Kejuaraan Nasional Piala Presiden IV tahun 2013 di Bandung. Keseluruhan pengalaman ini mencerminkan integritas, dedikasi, dan konsistensi dalam pengabdian.

Dalam ranah profesional, Dr. Carlos mengabdikan diri sebagai dosen tidak tetap sejak tahun 1999 di berbagai perguruan tinggi

negeri dan swasta di Kupang dan Malang. Selain itu, sejak tahun 2007 ia juga menekuni dunia kewirausahaan, khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan, sebagai wujud kemandirian dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi.

Sebagai akademisi produktif, ia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang membahas pendidikan, administrasi publik, kebijakan, demokrasi, pembangunan daerah, hingga tata kelola pemerintahan dan korporasi di era digital. Karya-karyanya merefleksikan konsistensi pemikiran yang kritis dan konstruktif terhadap dinamika perubahan sosial-politik kontemporer. Melalui buku-bukunya, ia mendorong inovasi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat marjinal, serta pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Perjalanan akademik, pengalaman organisasi, serta kiprah profesional yang luas menjadikan Dr. Carlos Manuel Maia sebagai figur akademisi-praktisi yang utuh. Ia tidak hanya bergiat dalam ranah konseptual, tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Dedikasinya terhadap pendidikan, administrasi publik, dan kesejahteraan sosial menghadirkan teladan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat bersinergi dengan tindakan nyata demi kemajuan masyarakat.

Birokrasi dan Administrasi Publik membahas birokrasi sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karya ini menguraikan sejarah, teori, kepemimpinan, prinsip administrasi publik, hingga dinamika birokrasi Indonesia. Pembaca diajak memahami bagaimana birokrasi dapat menjadi lebih profesional, responsif, dan berpihak pada masyarakat.

Dengan bahasa yang sistematis dan relevan, karya ini juga membahas ASN, good governance, administrasi keuangan, inovasi pelayanan, digitalisasi, dan akuntabilitas. Isinya cocok bagi mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintahan, dan pembaca umum. Karya ini menarik karena memadukan teori dan realitas birokrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berkeadilan.

Diterbitkan oleh:



Penerbit Selfietera Indonesia
Anggota IKAPI (173/DIY/2023)
Jlatren, Jogotirto, Kec. Berbah
Kabupaten Sleman, DIY 55573
www.selfietera.id

